

PKS dan Demokrat Tolak Pengesahan Perpu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang

TEMPO.CO, Jakarta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perpu Ciptaker menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perpu Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang hari ini, Selasa, 21 Maret 2023. Pengesahan itu mengalami penolakan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Demokrat. PKS walkout Anggota Fraksi PKS yang juga anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Bukhori menjelaskan, sesuai perintah konstitusi, Perpu Cipta Kerja atau Ciptaker mestinya dibahas dan disahkan pada masa persidangan terdekat usai Perpu diterbitkan. Selain itu, Bukhori mengatakan fraksinya menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Menghargai putusan MK terkait UU Ciptaker yang memerintahkan agar memperbaiki proses penyusunan UU serta melibatkan seluruh stakeholder, kata Bukhori dalam forum rapat paripurna, Selasa, 21 Maret 2023. Sebagai simbol penolakan, Fraksi PKS menyatakan walk out dan akan kembali pasca-agenda pengesahan Perpu Ciptaker dilakukan. Dengan segala hormat, kami Fraksi PKS menolak Perpu Nomor 2 tahun 2022 dan menyatakan walk out untuk agenda penetapan Perpu meski akan kembali lagi untuk agenda lain, kata Bukhori. Demokrat interupsi forum rapat Sementara Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Hince Panjaitan menginterupsi forum rapat. Hince menjelaskan, Mahkamah Konstitusi telah menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan meminta sejumlah perbaikan. Salah satu pertimbangan majelis adalah belum terpenuhinya pelibatan masyarakat kala menerbitkan UU. Bukannya melibatkan masyarakat, pemerintah justru merespons dengan mengeluarkan Perpu, kata Hince dalam rapat paripurna, Selasa, 21 Maret 2023. Selanjutnya: Oleh sebab itu, kata Hince, Fraksi Demokrat menilai Oleh sebab itu, kata Hince, Fraksi Demokrat menilai Perpu tidak sesuai dengan amar putusan MK yang menghendaki pelibatan masyarakat. Bukan hanya tidak memenuhi aspek legalitas, lanjut Hince, Perpu Ciptaker juga bisa mencoreng konstitusi. Apalagi, Hince menyebut alasan kegentingan memaksa yang kerap digembor-gemborkan pemerintah tidak

rasional. Kita bertanya, Perpu ini hadir untuk kepentingan memaksa atau kepentingan penguasa? kata Hinc. DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar hari ini. Adapun rapat ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Baleg telah gelar rapat bersama Kami menanyakan kepada seluruh anggota, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dapat disahkan jadi Undang-Undang?, tanya Puan diiringi jawaban setuju oleh peserta rapat, Selasa, 21 Maret 2023. Sebelum disahkan, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR M. Nurdin memaparkan proses pembicaraan tingkat I mengenai RUU Penetapan Perpu Ciptaker. Nurdin menjelaskan, Baleg telah menggelar rapat bersama pemerintah, membentuk panitia kerja (panja), hingga mendengarkan pendapat mini fraksi. Hasilnya, kata dia, sebanyak 7 fraksi parlemen bersepakat hasil panja dibawa ke pembicaraan tingkat II untuk disahkan jadi Undang-Undang. Adapun sebanyak 2 fraksi parlemen, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak Perpu Ciptaker dibawa ke rapat paripurna. 7 fraksi menerima dan sepakat dibawa ke pembicaraan tingkat II. Adapun Demokrat dan PKS belum menerima hasil kerja panja, kata Nurdin. Pilihan Editor: Jokowi Diminta Izinkan Polisi Periksa Hakim MK Usai Guntur Hamzah Langgar Etik Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik disini